PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemeri

by Nita Melinda

Submission date: 18-Aug-2018 09:17AM (UTC+0700)
Submission ID: 990866816
File name: ARTIKEL_NITA_MELINDA.docx (56.13K)
Word count: 3920
Character count: 26938

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Pembimbing:

Angky Febriansyah. SE., MM

Nita Melinda

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

Email: nitamelinda20@gmail.com

ABSTRACT

State administration must be accountable to the public. Government financial reports have a very vital function. One of its functions is the financial statement is a description of the condition of a government and as one way for local governments to realize financial accountability. Accountability is considered very important in realizing good government. This study aims to determine the effect of Regional Financial Accounting System to the financial management accountability of West Bandung regency, and to know the influence of accessibility of local financial statements to the financial management accountability of West Bandung regency.The method used in this research is descriptive and verifikatif method. The sample in this research is the Office of Regional Finance Management Agency (BPKD) Accounting Division Government of West Bandung regency with 33 respondents, with sampling using saturated sampling technique. Data analysis techniques using SEM Partial Least Square (PLS) analysis with the help of SmartPLS 3.0.M3 software. The results showed that the Regional Financial Accounting System has a significant effect on the accountability of financial management of West Bandung Regency, and accessibility of local financial statements has a significant effect on the accountability of financial management of West Bandung regency.

Keywords: ***Regional Financial Accounting System, accessibility of regional financial report, financial management accountability of West Bandung Regency.***

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim, 2012:35). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas

pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) Selanjutnya, dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana (Abdul Halim, 2012:43).

Fenomena berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemkab Bandung Barat yaitu prosedur akuntansi pengeluaran kas tidak dapat laksanakan dengan baik. Dalam hasil audit BPK RI, adanya proses pencairan dana APBD tanpa memenuhi prosedur mekanisme APBD. Salah satu contohnya, pencairan dana yang dikeluarkan dari rekening BUD kepada sekretariat daerah. BPK menilai, dalam hasil pemeriksaannya, semua penerimaan maupun pengeluaran kas daerah atas beban APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah tidaklah memenuhi prosedur mekanisme, sehingga terjadi kesulitan pengendalian dan berpotensi terjadi penyimpangan penggunaannya (Ani Ambarsari, 2018).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Subang belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Sampai saat ini keterbukaan informasi publik tersebut belum maksimal dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, dimana baru ada 16 SKPD yang sudah memiliki web site, sehingga tidak menutup kemungkinan bila ada masyarakat yang meminta data di SKPD terkait, akan sangat sulit untuk memberikan data tersebut, sesuai dengan hak dan kewajiaban yang diatur UU keterbukaan Informasi Publik (Cecep Wijaya Sari, 2017).

Fenomena yang terjadi mengenai penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini WDP berkaitan dengan aksesibilitas, yaitu keterlambatan SKPD dalam menyerahkan laporan dan kurangnya komitmen dari SKPD dinas terkait sehingga proses mengkompilasikan data per SKPD menjadi LKPD Pemda sebagai antisipasi transparansi menjadi terhambat dan keterbukaan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, karena tidak semua laporan pengelolaan keuangan daerah dapat di lihat dalam website SKPD, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan daerah (Ani Ambarsari, 2018).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungnjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2012:20).

Fenomena tentang akuntabilitas laporan keuangan daerah pada Kabupaten Bandung Barat yaitu kejujuran dan hukum. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat masih ditemukan permasalahan dalam anggaran yang digunakan oleh masing-masing kepala daerah dan SKPD terkait. Pemberian hibah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan hibah uang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban, penggadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, terdapat indikasi inflasi, terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terdapat pengadaan obat, kelebihan stok, pengadaan jenis obat yang sudah ditarik, tetapi masih dilaksanakan dan wajib pajak tidak patuh dan masih banyak temuan-temuan lainnya yang didapat oleh BPKP dan KPK di daerah Bandung Barat. Ini adalah salah satu bentuk permasalahan-permasalahan yang ada dan harus diperbaiki ke depan dan jangan sampai hal tersebut terulang kembali (Ani Ambarsari, 2018).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori kurang baik dan harus ditingkatkan (Seknas Fitra, 2017).
2. Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
3. Bandung Barat mendapatkan penilaian opini *disclaimer* atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 dan 2015.
4. Keterbukaan informasi publik tersebut belum maksimal dilaksanakan di Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Maksud Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis bagi penulis yaitu dengan melakukan penelitian ini penulis akan lebih dapat memahami tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan juga pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kegunaan bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada Pemerintah Daerah sebagai instansi pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan penelitian bagi akademis salah satunya untuk pengembangan Ilmu Akuntansi yaitu memberikan informasi tentang keterkaitan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Adapun kegunaan akademis bagi peneliti lain diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi yang bermanfaat khususnya mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penelitian ini apabila ada yang bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:43) definisi dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)."

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2013:84)
terdiri dari:

> "1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
> 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
> 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
> 4. Prosedur Akuntansi Aset."

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pengertian aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:7) sebagai berikut:

> "Aksesibilitas berasal dari kata akses yang berarti jalan masuk, aksesibilitas sendiri bisa diartikan suatu hal yang bisa dijadikan akses, yang bisa dikaitkan dan memiliki keterkaitan."

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Selanjutnya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dikatakan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuak melalui media massa.
2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*)

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012:20):

> "Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas

kegiatan yang menjadi tanggungnjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Indikator akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9) adalah:

"1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality)*
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)."

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Abdul Halim (2012:35) mengatakan bahwa:

"Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai."

2.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Mahsun (2012:43) menyatakan bahwa:

"Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan.Yang berarti semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai akses yang mudah oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

H2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan survei.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil jawaban kuesioner yang telah diisi responden.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam enelitian ini adalah menggunakan kuesioner.

3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 33 orang.

3.3.2 Penarikan Sampel

Syarat penggunaan teknik sampling jenuh menurut Arikunto (2010: 64) sebagai berikut:

> "Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi."

3.3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Gedung C Lt. 3 Jl. Padalarang - Cisarua km 2 Ds.Mekarsari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2018.

3.4 Metode Pengujian Data

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2014:173) instrumen yang reliabel adalah:

> "Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula."

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis Deskriftif hanya menggambarkan dan melihat apa yang terjadi di lapangan.

3.6.2 Metode Analisis Verifikatif

Metode Analisis Verifikatif adalah untuk membuktikan hipotesis (pengeruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

1. **Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1669 (53,2%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Tanggapan Responden Mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 260 (52,5%) berada diantara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berada dalam kategori cukup baik, sehingga harus ada perbaikan atas kelemahan dalam aksesibilitas laporan keuangan daerah.

3. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 965 (58,5%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

a. Convergent Validity

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi yang dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus ≥ 0,5.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square* (PLS) dapat menggunakan *Composite Reliability* (CR), dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

3. **Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)**

Uji kecocokan seluruh model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). Dapat dilihat pada Tabel 4.6.

4.1.2.2 Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values* yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak. Taraf signifikan yang diberikan adalah a = 0,001. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.9 dan tabel 4.10.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 5,201 dengan nilai t tabel sebesar 1,6955. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (5,201 > 1,6955) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 37,8% dan sisanya sebesar 62,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pengelolaan keuangan daerah, kualitas SDM, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan penyajian laporan keuangan.

Fenomena berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemkab Bandung Barat yaitu prosedur akuntansi pengeluaran kas tidak dapat laksanakan dengan baik. Dalam hasil audit BPK RI, adanya proses pencairan dana APBD tanpa memenuhi prosedur mekanisme APBD. Salah satu contohnya, pencairan dana yang dikeluarkan dari rekening BUD kepada sekretariat daerah. BPK menilai, dalam hasil pemeriksaannya, semua penerimaan maupun pengeluaran kas daerah atas beban APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah tidaklah memenuhi prosedur mekanisme, sehingga terjadi kesulitan pengendalian dan berpotensi terjadi penyimpangan penggunaannya (Ani Ambarsari, 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Abdul Halim (2012:35) bahwa dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai."

4.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) sebesar 4,677 dengan nilai t tabel sebesar 1,6955. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (4,677 > 1,6955) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh aksesibilitas laporan keuangan daerah. Besarnya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 34,3% dan sisanya sebesar 65,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pengelolaan keuangan daerah, kualitas SDM, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan penyajian laporan keuangan.

Adapun fenomena penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini WDP berkaitan dengan aksesibilitas, yaitu keterlambatan SKPD dalam menyerahkan laporan dan kurangnya komitmen dari SKPD dinas terkait sehingga proses mengkompilasikan data per SKPD menjadi LKPD Pemda sebagai antisipasi

transparansi menjadi terhambat dan keterbukaan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, karena tidak semua laporan pengelolaan keuangan daerah dapat di lihat dalam website SKPD, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan daerah (Ani Ambarsari, 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mahsun (2012:43) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan, yang berarti semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai akses yang mudah oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan kategori korelasi kuat dan positif. Artinya semakin baik implementasi sistem informasi manajemen daerah maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Namun ada beberapa yang menyebabkan implementasi sistem informasi manajemen daerah belum maksimal yaitu pada indikator prosedur akuntansi penerimaan kas untuk pernyataan nomor 5 tentang bukti transaksi yang digunakan: SP2D, Nota Kredit Bank dan Bukti Transaksi Lainnya.
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan aplikasi SIMDA, dengan kategori korelasi kuat atau erat dan positif. Artinya semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah maka akan semakin tinggi pula kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1. Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

   Diharapkan sebaiknya perlu melakukan perbaikan terhadap jaringan komunikasi agar mendukung kinerja dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah. Hal tersebut bisa terwujud apabila bekerja sama

dengan perusahaan penyedia Menempatkan pegawai pada posisi yang tepat dalam menjalani implementasi SIMDA, pegawai tersebut sebagai *brainware* yang ahli dan kompeten dalam menjalankan komputer yang sesuai dengan bidangnya.

2. Bagi Pegawai
   Diharapkan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan implementasi sistem informasi manajemen daerah semakin baik, sebaiknya pegawai terus menambah pengetahuan dan kemampuan dalam hal implementasi sistem informasi manajemen daerah serta dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pelatihan dan seminar yang diadakan secara rutinitas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Implementasi sistem informasi manajemen daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2012, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Juliansyah Noor, 2012, Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi. IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta

Mahsun, Mohamad, *2012*, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta

Mardiasmo, 2012, Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta

Nazir, 2014, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Seknas Fitra, 2017, Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) Hasil Penelitian Di 20 Kabupaten/Kota Program Kinerja

Sugiyono, 2011, Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta

Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung:Alfabeta

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif Dan R&D, Bandung:Alfabeta

Umi Narimawati, 2010, Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesi

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

LAMPIRAN

Tabel 4.1

Loading Factor

Variabel Manifes		Loading Faktor	Ket.
SAKD01	Prosedur akuntansi penerimaan kas	0.784	Valid
SAKD02	Prosedur akuntansi pengeluaran kas	0.848	Valid
SAKD03	Prosedur akuntansi asset	0.848	Valid
SAKD04	Prosedur akuntansi selain kas	0.903	Valid
Variabel Manifes		**Loading Faktor**	**Ket.**
AKSES1	Keterbukaan	0.650	Valid
AKSES2	Kemudahan	0.706	Valid
AKSES3	Dapat dipahami	0.692	Valid
Variabel Manifes		**Loading Faktor**	**Ket.**
AKUN01	Akuntabilitas kejujuran dan hukum	0.907	Valid
AKUN02	Akuntabilitas proses	0.831	Valid
AKUN03	Akuntabilitas program	0.943	Valid
AKUN04	Akuntabilitas kebijakan	0.867	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.2

AVE

Variabel Laten	AVE
X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,717
X2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah	0,654
Y. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	0,789

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.3

Cross Loading Factor

	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)
SAKD01	0.784	0.201	0.583
SAKD02	0.848	0.335	0.547
SAKD03	0.848	0.335	0.547
SAKD04	0.903	0.357	0.710
AKSES1	0.047	0.650	0.403
AKSES2	0.203	0.706	0.416
AKSES3	0.428	0.692	0.563
AKUN01	0.699	0.575	0.907
AKUN02	0.390	0.615	0.831
AKUN03	0.678	0.603	0.943
AKUN04	0.709	0.661	0.867

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.4

Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	AKAR AVE
X_1	0,847
X_2	0,809
Y	0,888

Korelasi Antar Variabel Laten			
	X_1	X_2	Y
X_1	1,000		
X_2	0,364	1,000	
Y	0,712	0,690	1,000

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.5

Composite Reliability

Variabel Laten	*Composite Reliability*
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X1)	0,910
Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)	0,724
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,937

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.6

Hasil Nilai GoF

	AVE	*R Square*
Rata-rata	0,720	0,721
Nilai GoF	0.512	

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.7

Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis

(*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	*T Statistics (|O/STERR|)*
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) -> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,531	5,201
Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) -> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,497	4,677

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.8

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) -> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,531	0,712	37,8%
Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) -> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,497	0,690	34,3%
TOTAL PENGARUH (R^2)			**72,1%**

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas *Smart* PLS

Tabel 4.9

Uji *t* Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_1 -> Y	0,531	5,201	1,6955	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas PLS

Tabel 4.10

Uji *t* Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_1) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_2 -> Y	0,497	4,677	1,6955	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan prosedur akuntansi pengeluaran kas PLS.

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemeri

ORIGINALITY REPORT

21%	22%	6%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	7%
2	media.neliti.com Internet Source	7%
3	ejournal.unp.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	2%
6	elib.unikom.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		